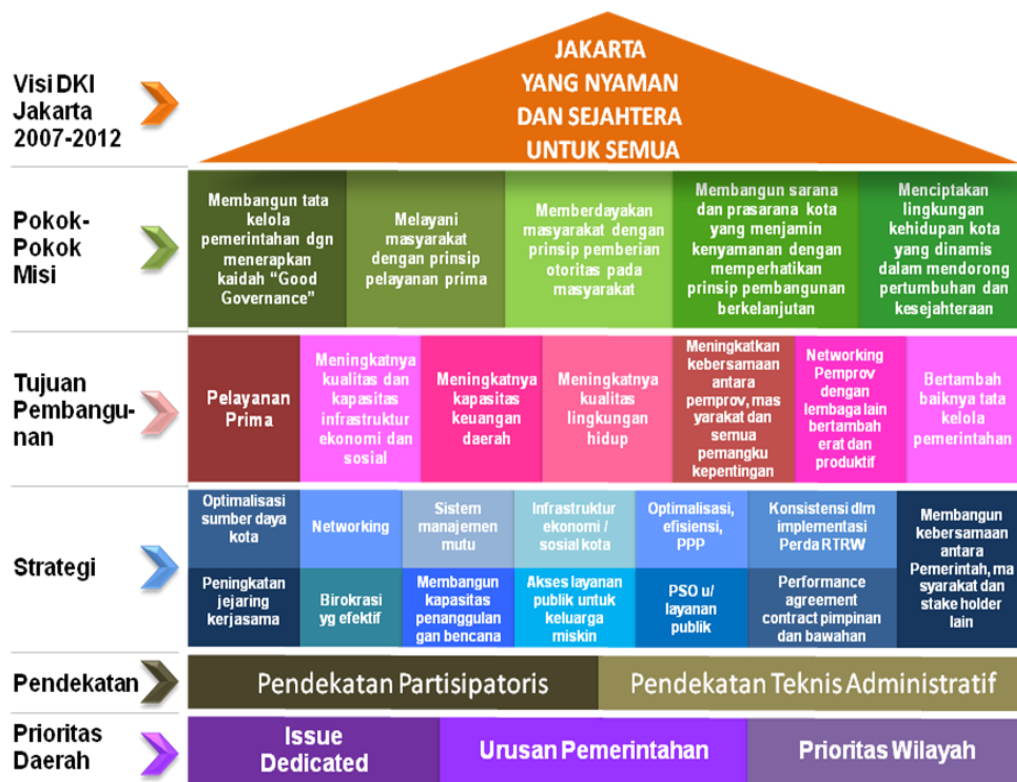


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 18, LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan : arah kebijakan umum pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2007 – 2012, visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Pembangunan DKI Jakarta
menurut RPJMD 2007-2012



Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2007 - 2012

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Pembangunan 2007–2012 adalah”**JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.
- b. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat,layak dan manusiawi.

Jakarta adalah sebuah kota metropolitan yang menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua,jika pemerintah dan masyarakatnya bersepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan timbul, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih optimal memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2. Misi

Misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance*
- b. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima
- c. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan

- d. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan
- e. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Makna misi yang dimaksud adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance*", bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance*, yakni:
 - a. Partisipasi masyarakat
 - b. Tegaknya supremasi hukum
 - c. Transparansi
 - d. Kesetaraan
 - e. Daya tanggap kepada *stakeholders*
 - f. Berorientasi pada visi
 - g. Akuntabilitas
 - h. Pengawasan
 - i. Efektivitas dan efisiensi
 - j. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja. Misi ini akan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, serta perhubungan dan transportasi.

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.
4. Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik untuk bermusyawarahdan sekaligus merupakan proses pembelajaran kehidupan demokratis.
5. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan dengan pengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif.
6. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bermakna bahwa Jakarta memiliki "*favorable climate*" untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni:
 - a. *Human*
 - b. *Social*
 - c. *Cultural*
 - d. *Intelectual and Creative*
 - e. *Natural*
 - f. *Environmental*
 - g. *Infrastructure*

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah. Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh aset kota dimaksud.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

Strategi pembangunan Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah dan pendekatan.

1. Tujuan Pembangunan Daerah

- a. Meningkatnya kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
- c. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- e. Meningkatnya kebersamaan antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota
- f. Makin bertambah erat dan produktifnya jejaring kerja sama (*networking*) pemerintah provinsi dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional, regional dan internasional
- g. Bertambah baiknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah

2. Strategi Pembangunan Daerah

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota yang mencakup aset *Human, Social, Cultural, Intellectual and Creative, Natural, Environmental dan Infrastructure*, dalam rangka memberikan kontribusi guna terwujudnya kota Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua serta berkelanjutan
- b. Pengembangan jejaring kerja sama (*networking*) nasional, regional dan internasional, meliputi antara lain: pertukaran informasi, penggunaan sumber-sumber yang dibutuhkan secara bersama, pertukaran barang dan jasa, pengetahuan serta keahlian yang saling menguntungkan

- c. Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik
- d. Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur ekonomi/sosial kota yang strategis
- e. Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta (*public private partnership*)
- f. Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan, mengembalikan keadaan udara bersih, laut biru dan air tanah yang tidak tercemar
- g. Membangun model kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota, dengan tahapan antara lain:
 - Memilih urusan/masalah di setiap tingkat pemerintahan yang akan menjadi model perwujudan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat
 - Membuat *pilot project* tentang mekanisme penyelesaian masalah kota, dengan pemberian otoritas kepada masyarakat (komunitas profesional) untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahannya
 - Apabila mekanisme tersebut berhasil maka proses pembangunan kesepakatan tersebut dapat ditingkatkan menjadi kebijakan daerah
 - Replikasi dan penyempurnaan model pada urusan lainnya
- h. Membangun model peningkatan kinerja jejaring kerjasama dilakukan dengan tahapan:
 - Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk penyelesaian masalah kota seperti banjir, kemacetan dan lain-lain

- Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk pengembangan kerjasama antarKota/Kabupaten Jabodetabekjur maupun dengan Provinsi se-Jawa Bali
 - Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama internasional untuk permasalahan yang spesifik di Ibukota
- i. Membentuk birokrasi yang efektif melalui:
- Perampingan organisasi
 - Penguatan fungsi regulator di tingkat Provinsi
 - Pendelegasian kewenangan Provinsi dan fungsi operator sampai ke tingkat wilayah atau satuan kerja operasional
 - Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
 - Penerapan prinsip *good governance* pada setiap tingkat pemerintahan
 - Pemanfaatan teknologi informasi/internet pada semua tingkat pemerintahan
 - Pengintegrasian dan pembentukan satuan kerja perijinan dan investasi
 - Pembentukan fungsi pengelolaan hutang dan aset pemerintah Provinsi (*debt management and asset management unit*)
 - Penerapan dan penyempurnaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada satuan kerja operasional.
 - Penetapan SKPD sebagai *pilot project* untuk model penerapan kaidah *Good Governance*. Pada SKPD tersebut secara terencana dilakukan perbaikan pada proses kerja, organisasi, SDM, infrastruktur dan teknologi yang digunakan
- j. Membangun kapasitas penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan fungsi *crisis centre*, pemadam kebakaran dan ambulan gawat darurat dalam satu pengelolaan
- k. Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin antara lain melalui pengelolaan data gakin terpadu, distribusi beras (*raskin*), pendidikan SD, SMP dan SMK, pelayanan kesehatan melalui Sistem

Jaminan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan pemakaman

- I. Menyediakan subsidi langsung berupa dana *Public Service Obligation* (PSO) untuk pelayanan publik tertentu, antara lain angkutan umum dan pelayanan rawat inap
- m. Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk *performance agreementcontract* antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah:

- a. Pendekatan Partisipatoris

Pembangunan berbasis Komunitas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan pengendalian secara sinergis

- b. Pendekatan Teknis Administratif

Reformasi Birokrasi melalui penataan kelembagaan, penataan mekanisme kerja organisasi, penataan administrasi sumber daya aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, dengan pelimpahan tugas yang lebih luas kepada Kotamadya/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 disusun sebagai penjabaran RPJMD 2007-2012 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 2012. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai dengan tahun 2010 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2011, masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan urusan tahun 2012.

Fokus RKPD 2012 yang ditetapkan dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 adalah percepatan pencapaian target sesuai visi dan misi RPJMD 2007-2012, serta sinergi dengan prioritas dan program nasional. Dengan

demikian kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2012 diprioritaskan untuk:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan utamanya untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan;
- d. Pembangunan sarana prasarana kota untuk memperlancar aktifitas perekonomian kota dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat.

Selanjutnya kebijakan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan menurut *issue dedicated*, pemerintahan dan prioritas wilayah.

1. Pembangunan DKI Jakarta Menurut *Issue Dedicated*

Program Prioritas Daerah yang bersifat *top-down* dikenal dengan sebutan Program *Dedicated* yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat, dapat bersifat *multi-years* yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, berbentuk fisik, dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Dalam hal pembangunan fisik, program *dedicated* antara lain ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan pengendalian banjir, perhubungan dan transportasi, penanggulangan polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (permukiman dan penyediaan air bersih), pengelolaan bencana serta antisipasi perubahan iklim.

Dalam bidang sosial program *dedicated* meliputi perbaikan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan. Mekanisme pengalokasian anggaran untuk Program *Dedicated* menggunakan pendekatan *top-down* sehingga mengikat instansi wilayah maupun sektoral untuk melaksanakan program dimaksud secara optimal.

Secara skematis bidang pembangunan yang dikelompokkan dalam program dedicated dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.1
Pembangunan DKI Jakarta Menurut Issue Dedicated

No.	ISU/PROGRAM/KEGIATAN
1.	PENGENDALIAN BANJIR a. Program pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan tanah BKT b. Program normalisasi sungai dan saluran <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan tanah Kali Sunter (Cipinang Melayu) - Pembebasan tanah Kali Pesanggrahan Jakarta Selatan - Pembebasan tanah Kali Angke Hulu - Normalisasi Kali Sekretaris c. Program penataan dan pembangunan situ dan waduk <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Waduk Halim - Pembangunan Waduk Bintaro - Pembangunan Waduk Brigif - Pembebasan tanah Waduk Surilang - Pembebasan Tanah Waduk Marunda beserta Sarana dan Prasarananya
2.	PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI a. Program pembangunan <i>fly-over</i> dan <i>underpass</i> (FO/UP) <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan FO Mangga Dua-Gunung Sahari - Pembangunan UP Cendrawasih b. Program optimalisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang - Pembangunan jalan layang non tol Pangeran Antasari-Blok M - Pembangunan On/Off Ramp Barat Jalan Layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang - Pembangunan jalan sejajar BKT - Pembangunan jalan <i>missing link</i> c. Program pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang - Pembangunan akses Terminal Pulo Gebang d. Program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kep. Seribu <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kapal penyeberangan - Pematangan lahan Pelabuhan Kapal Penumpang Muara Angke e. Program pembangunan Busway koridor XI - XV <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan bus Busway - Pembangunan Busway Koridor Pluit-Tanjung Priok - Pembangunan Busway Koridor Pulogadung-Bekasi (ke Perbatasan Jakarta Timur Perumahan Harapan Indah) - Pembangunan Busway Koridor Kalideres-Tangerang - Pembangunan Busway Koridor Kantor Walikota Jakarta Barat-Kalideres f. Program pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan MRT Koridor Lebak Bulus s.d. HI - Pengkajian MRT Koridor Barat - Timur - Pembebasan Tanah untuk MRT (Koridor/Stasiun) Jl. Lebak Bulus-Jl. Fatmawati
3.	PENINGKATAN KUALITAS KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT a. Program peningkatan kualitas permukiman dan perbaikan kampung <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan MHT Plus di 6 Wilayah Kabupaten/Kota Administrasi - Pembangunan Rumah Susun Sewa di Pluit, Marunda, Penjaringan & Daan Mogot b. Program peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan RSUD Jakarta Selatan - Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Pesanggrahan - Rehab total Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu - Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kalideres - Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Grogol Petamburan - Peningkatan Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk

No.	ISU/PROGRAM/KEGIATAN
3.	PENINGKATAN KUALITAS KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT c. Program Peningkatan Layanan Penduduk Miskin <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) GAKIN - Penanggulangan Kemiskinan d. Program peningkatan layanan pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - BOP SD/MIN - BOP SMP/MTsN - BOP SMA/ MAN - BOP SMKN - Beasiswa rawan putus sekolah siswa SMA negeri dan swasta - Beasiswa rawan putus sekolah siswa SMK negeri dan swasta - Rehab Gedung Sekolah e. Program Pengembangan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan stadion BMW - Perencanaan pembangunan pengganti Stadion Lebak Bulus - Pembebasan lahan pengganti Stadion Lebak Bulus
4.	PENGEMBANGAN BUDAYA KERAGAMAN a. Program pembangunan <i>fly-over</i> dan <i>underpass</i> (FO/UP) <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Pusat Kebudayaan Betawi di eks Kodim Jakarta Timur - Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan - Pembebasan lahan P. Jayakarta - Antisipasi konflik antar warga masyarakat - Peningkatan daya tarik dan pengamanan Kota Tua - Pembangunan jalan sejajar BKT - Pembangunan jalan <i>missing link</i>
5.	PENERAPAN KAJIDAH GOOD GOVERNANCE a. Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 5 Kota b. Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pelayanan publik pemerintah kelurahan (Penguatan Kelurahan) - Peningkatan kapasitas pelayanan publik pemerintah kecamatan (Penguatan Kecamatan) - Peningkatan manajemen layanan publik pemerintah kecamatan dan kelurahan
6.	PENGELOLAAN BENCANA Peningkatan Kinerja Pengelolaan bencana <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan <i>Search And Rescue</i> (SAR)
7.	ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung DPRD dan Pengembangan Balaikota - Retrovit Green Building Gedung Dinas Perumahan dan gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
8.	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan lahan RTH - Pembangunan taman - Penghijauan kawasan pemukiman b. Penanganan Kebersihan, Sanitasi dan Air Bersih <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Intermediary Treatment Facility (ITF) Sunter - Pembangunan prasarana air limbah
9.	PENGEMBANGAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

Sumber : RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

2. Pembangunan DKI Jakarta Menurut Urusan Pemerintahan

Prioritas pembangunan menurut urusan terdiri atas 29 urusan pemerintah yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.2
Pembangunan DKI Jakarta Menurut Urusan Pemerintah



a. Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan urusan pendidikan di tahun 2012 yaitu :

1. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh anak usia sekolah melalui:
 - a. Penyediaan beasiswa bagi siswa rawan putus sekolah.
 - b. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan agar memenuhi standar, sesuai dengan target RPJMD.
2. Menyediakan pelayanan pendidikan menengah yang lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, melalui:
 - a. Peningkatan daya tampung pendidikan menengah untuk dapat menampung meningkatnya lulusan SMP/MTs/Sederajat.

- b. Penambahan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kerangka pemenuhan SPM.
 - c. Penyediaan bantuan pendidikan bagi penduduk miskin untuk memastikan semua anak dari keluarga miskin dapat mengikuti pendidikan menengah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar secara menyeluruh dan sistematis dengan penekanan pada peningkatan tata kelola satuan pendidikan, kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana penunjang.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan penekanan pada peningkatan tata kelola satuan pendidikan menengah, kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana penunjang.
5. Meningkatkan kualitas kompetensi dan relevansi pendidikan kejuruan sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat memasuki pasar kerja, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas lulusan SMK yang mampu berbahasa Inggris melalui sertifikasi Test of International Communication (TOEIC).
 - b. Peningkatan harmonisasi pendidikan menengah kejuruan dan pelatihan ketrampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespon kebutuhan pasar yang dinamis.
 - c. Peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan dan pelatihan ketrampilan dengan dunia industri/dunia usaha.
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan kejuruan melalui pengadaan peralatan praktek siswa SMK dan rehab gedung Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan (Puslatdikjur).
6. Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan non formal sebagai wadah pelayanan pendidikan sepanjang hayat melalui:
 - a. Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non formal.

- b. Pengintegrasian pelatihan ketrampilan dengan SMA/SMK melalui kursus-kursus agar lulusan SMA/SMK memperoleh keterampilan yang tersertifikasi kompetensi dari asosiasi profesi.
 - c. Penguatan sistem dan pelaksanaan akreditasi bagi lembaga kursus.
7. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik melalui peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik untuk memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, menyediakan berbagai tunjangan bagi pendidik, penguatan sistem penilaian kinerja pendidik.
 8. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini yang didukung dengan Pengembangan Anak Usia Dini (Childhood Care Early Education) secara holistik-integratif untuk mendukung kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar, khususnya untuk penduduk miskin.
 9. Memperkuat tata kelola pelayanan pendidikan melalui:
 - a. Penguatan pengelolaan sistem keuangan pendidikan melalui penyiapan kerangka regulasi akuntabilitas keuangan di tingkat satuan pendidikan sejalan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Penguatan sistem informasi pendidikan sebagai pilar dalam penilaian kinerja pembangunan pendidikan dan landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan, dan perumusan pentahapan pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan.
 - c. Penguatan sistem penilaian kinerja pendidikan tingkat daerah, wilayah, sampai tingkat satuan pendidikan.

b. Kesehatan

Arah kebijakan pembangunan urusan kesehatan di tahun 2012 yaitu :

1. Terlayannya jumlah keluarga miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan hingga mencapai 100%.

2. Percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di kawasan Jakarta Selatan sehingga bertambah lagi jumlah RSUD yang ada di DKI Jakarta.
3. Mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan peraturan tentang Sistem Kesehatan Nasional.
4. Peninjauan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit DBD, khususnya mengenai penanggung jawab pelaksana fogging.
5. Peningkatan layanan Puskesmas Kecamatan dengan menambah fasilitas layanan rawat inap selain rumah bersalin.
6. Rehab total 7 Puskemas Kelurahan.
7. Menurunkan kasus penyakit menular dengan meningkatkan pengendalian vektor penyakit, pengembangan public private mix TB, imunisasi dan pengendalian flu burung.
8. Mempercepat penurunan tingkat kematian ibu dan anak dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di tingkat dasar dan rujukan; membentuk kemitraan yang efektif; meningkatkan pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat; meningkatkan manajemen program KIA, perbaikan gizi masyarakat serta pengendalian penyakit melalui pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak; penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita; serta penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat.
9. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit; melalui peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah awal untuk setiap kasus penyakit dan KLB; peningkatan imunisasi; serta penanggulangan penyakit flu burung dan kesiap siagaan pandemi influenza.
10. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan maupun melalui jaminan pembiayaan kesehatan dengan cara menerapkan pola asuransi kesehatan.

11. Meningkatkan kinerja penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan melalui pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana serta antisipasi KLB di Rumah Sakit.
12. Meningkatkan ketersediaan dan mutu obat melalui peningkatan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan serta vaksin; peningkatan sarana dan prasarana; pengujian sampel obat dan makanan; pemeriksaan sarana produksi serta distribusi obat dan makanan; peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.
13. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta RSUD.
14. Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, melalui pembenahan manajemen dengan pemanfaatan data RTS sebagai data dasar pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di Puskesmas dan jaringannya; pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit; dan pembiayaan jaminan kesehatan.
15. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
16. Peningkatan kualitas layanan Puskesmas Kelurahan utamanya pada Kelurahan padat penduduk melalui peningkatan manajemen layanan (sertifikasi), peningkatan posyandu Mandiri hingga mencapai 55% dan peningkatan RW Siaga Aktif sampai angka 80%.
17. Pengembangan Puskesmas Kecamatan dengan fasilitas tempat rawat inap selain rawat bersalin.
18. Peningkatan kualitas aparat kesehatan masyarakat di Kelurahan.
19. Meningkatkan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat sebagai upaya preventif menghadapi penyakit.
20. Antisipasi penanggulangan bencana siklus lima tahunan.
21. Pilot Project Kelurahan yang menerapkan upaya kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pada RW Siaga Aktif dan Posyandu Mandiri.

c. Pekerjaan Umum

Arah kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum di tahun 2012 yaitu :

1. Percepatan penyelesaian KBT, melalui :
 - a. Percepatan penyelesaian *Green Belt* KBT.
 - b. Penataan kelembagaan pengelola KBT.
2. Optimalisasi pengendalian banjir
 - a. Percepatan revitalisasi, pengerukan, dan penataan bantaran kali pada lokasi Kali Banglio, Kali Cakung Lama, dan Kali Sekretaris serta kali dan waduk yang masuk program JEDI.
 - b. Percepatan revitalisasi, pengerukan dan penataan situ dan waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III, Waduk Pondok Rangun, Waduk Cilangkap, Waduk Pluit, Waduk Halim, dan Polder Kapuk Poglar.
 - c. Peningkatan kinerja sistem pompa dan polder, terutama pada lokasi yang merupakan national importance.
 - d. Melanjutkan upaya peningkatan rasio badan air (water ratio) dan rasio jalan (road ratio) serta mengurangi titik genangan.
 - e. Penanganan genangan air di 5 wilayah melalui pembangunan /perbaikan/pemeliharaan drainase mikro secara terintegrasi.
 - f. Melindungi Kawasan di Utara Jakarta dari genangan akibat pasang laut melalui pembangunan tanggul pengaman pantai pada daerah rawan rob, dikombinasikan dengan pembangunan sistem polder dan pintu-pintu air.
 - g. Peningkatan koordinasi untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi program sektor dan lintas kewenangan/urusan (pusat-daerah dan provinsi) dalam pengendalian banjir.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian banjir dan penanganan genangan, melalui:
 - a. Peningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.

- b. Peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir.
 - c. Optimalisasi peran swasta dan dalam sumber pendanaan pengendalian banjir.
4. Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui:
 - a. Optimalisasi jaringan jalan, terutama untuk mendukung pembangunan jalan layang non tol yaitu pembangunan dan peningkatan jalan-jalan alternatif.
 - b. Percepatan pembangunan *Fly Over/Underpass* terutama yang berpotongan dengan jalur KA Lingkar.
 5. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan melalui:
 - a. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.
 - b. Perwujudan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak swasta baik dalam penyediaan pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi maupun dalam pengangkutan sampah.
 - c. Meningkatkan volume sampah yang dapat tertangani.
 6. Percepatan pembangunan gedung untuk layanan publik dan pemerintahan.
 7. Melanjutkan pembangunan gedung Pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip *Green Building*.
 8. Pelaksanaan operasional satu buah *Intermediate Treatment Facilities* (ITF).
 9. Meningkatkan kinerja pengolahan air limbah *septic tank*.

d. Perumahan Rakyat

Arah kebijakan pembangunan urusan perumahan rakyat di tahun 2012 yaitu :

1. Percepatan pembangunan rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta jaringan utilitas pada lahan yang siap bangun, terutama untuk mendukung program *resettlement* penduduk

disepanjang bantaran kali, waduk dan situ, khususnya yang terkait dengan program pinjaman (*loan*) JEDI.

2. Menyiapkan perencanaan (*Master Plan/Strategic Plan*) pembangunan rumah susun yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Percepatan pelaksanaan pembebasan lahan dan pembangunan prasarana sarana pendukung perbaikan kampung terpadu (MHT Plus) untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat ditinjau dari aspek fisik, ekonomi dan sosial sesuai target-target MDGs 2014.
4. Penyiapan dan pemberdayaan masyarakat calon penghuni rusun untuk menghuni rusun yang telah terbangun, termasuk penyiapan lembaga pengelola rusun yang efektif, efisien dan akuntabel.
5. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung rumah susun untuk mempercepat penghunian rusun.
6. Percepatan proses penyerahan pengelolaan Rusun dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta, sambil menunggu proses penghapusan aset di Pemerintah Pusat.

e. Penataan Ruang

Arah kebijakan pembangunan urusan penataan ruang di tahun 2012 yaitu :

1. Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta.
2. Percepatan proses sertifikasi ISO untuk pelayanan ketatakotaan di tingkat Kecamatan.
3. Peningkatan efektifitas penertiban bangunan yang melanggar IMB dan IPB.
4. Meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Memantapkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat dan daerah.

f. Perencanaan dan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan urusan perencanaan dan pembangunan di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan, melalui pengembangan kompetensi tenaga perencana urusan, lintas urusan, dan kewilayahan.
2. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap permasalahan kota.
3. Sinkronisasi fungsi penelitian, Urusan Statistik dan Urusan Perencanaan Pembangunan.
4. Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan Daerah.
5. Mengembangkan manajemen perencanaan.
6. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam perencanaan pembangunan.
7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam perencanaan pembangunan.

g. Perhubungan

Arah kebijakan pembangunan urusan perhubungan di tahun 2012 yaitu :

1. Mengoptimalkan pelayanan *Busway* sebagai sarana angkutan umum massal, antara lain melalui :
 - a. Percepatan pembangunan Koridor *Busway*.
 - b. Pengadaan armada *Busway (Articulated Bus)*.
 - c. Perawatan dan penyempurnaan halte *Busway* dan sarana/prasarana penunjangnya.
 - d. Melanjutkan sterilisasi koridor *Busway* di seluruh koridor yang beroperasi.
 - e. Menyusun dan mengoptimalkan layanan feeder dan meningkatkan kapasitas *pool Busway*.
 - f. Terintegrasinya sistem Informasi perjalanan *Busway* melalui *Intelligence Transport System (ITS)*.

2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima dan berstandar internasional.
3. Percepatan pengadaan tanah untuk koridor MRT Lebak Bulus tuntas pada tahun 2012.
4. Memanfaatkan aset dari Proyek Monorail yang sudah ada saat ini.
5. Uji coba *Electronic Road Pricing* (ERP) pada ruas jalan yang sudah ditentukan, dan terintegrasinya *database* kendaraan bermotor Polda Metro Jaya dengan sistem ERP.
6. Menjamin ketersediaan pasokan BBG untuk mendukung operasi armada *Busway* di seluruh koridor yang beroperasi
7. Menjamin ketertiban parkir khususnya parkir *on-street* melalui:
 - a. Penegakan peraturan clamping kendaraan.
 - b. Sosialisasi yang memadai tentang penertiban parkir umum dan pengaturan parkir taksi.
 - c. Meningkatkan partisipasi pemilik kegiatan usaha untuk berperan serta mendukung kebijakan penertiban parkir.
 - d. Menambah atau memperbaiki marka jalan untuk parkir *on-street*.
8. Meningkatnya pemanfaatan jalur lambat bagi pengguna sepeda motor melalui:
 - a. Sosialisasi penggunaan jalur lambat kepada pengguna sepeda motor.
 - b. Pembuatan marka lajur sepeda motor pada jalan yang tidak memiliki jalur lambat.
 - c. Penyediaan rambu lalu lintas petunjuk sepeda motor untuk menggunakan jalur lambat.
9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk beroperasinya Terminal Bus antar kota Pulo Gebang untuk menggantikan Terminal Bus Pulogadung.
10. Meningkatkan kapasitas Terminal Bus Kalideres serta Lebakbulus.
11. Beroperasinya Pelabuhan Muara Angke secara penuh sebagai pelabuhan penyeberangan.

12. Berkelanjutannya operasional kapal penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu.
13. Melanjutkan revitalisasi bajaj BBM menjadi berbahan bakar gas.
14. Meningkatkan layanan bus sekolah sebagai sarana angkutan yang terjangkau dan memadai bagi para pelajar.
15. Melakukan persiapan Pembangunan KA ke Bandara Soekarno-Hatta.
16. Melaksanakan pembangunan gedung parkir Glodok.
17. Meningkatkan fasilitas *park and ride* di terminal *Busway* atau Stasiun KA.
18. Melakukan penataan jalan lingkungan dan pembebasan tanah untuk akses dari dan ke Terminal Pulo Gebang.

h. Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pembangunan urusan lingkungan hidup di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penambahan dan pengembangan taman, hutan, dan kawasan pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ serta pemeliharaan RTH yang sudah terbangun.
2. Peningkatan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembangunan dengan mendorong dan memastikan pemenuhan standar baku mutu air, udara, serta meningkatnya upaya pemantauan kualitas lingkungan dengan melalui pengadaan dan pemeliharaan stasiun pemantau kualitas udara.
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan melalui peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pelanggar aturan lingkungan, baik oleh aparat pengelola lingkungan maupun aparat penegak hukum.
4. Memperluas cakupan kawasan HBKB dan peningkatan jumlah HBKB setiap tahunnya.

5. Penyusunan *Road Map* dan Rencana Aksi Daerah pengurangan emisi/karbon Jakarta sebanyak 30% di tahun 2030.

i. Pertanahan

Arah kebijakan pembangunan urusan pertanahan di tahun 2012 yaitu :

1. Menerapkan kebijakan pertanahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota melalui peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, termasuk mengembangkan strategi percepatan pendaftaran tanah termasuk akses masyarakat miskin terhadap pemilikan sertifikat dan sumber permodalan, serta mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara dan kelembagaan pertanahan melalui:
 - a. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan (sektoral, pusat, dan daerah).
 - b. Peningkatan kapasitas SDM.
3. Mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan ruang.
4. Menata struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui:
 - a. Penyediaan informasi spasial untuk pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*land use monitoring system*).
5. Mendorong peningkatan sertifikasi tanah milik masyarakat.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Arah kebijakan pembangunan urusan pertanahan di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat, dengan mempersingkat waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan.

2. Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan setiap tahun, antara lain dengan penerapan KK berbasis KK Nasional dan KTP berbasis NIKNAS.
3. Mengkoordinasikan perumusan dan pengimplementasian konsep *Single Identification Number* (SIN) yang bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait baik swasta maupun pemerintah.
4. Melakukan kerjasama registrasi kependudukan dengan Pemda di wilayah Bodetabekjur antara lain terkait integrasi data kependudukan DKI dengan 6 Kota/Kabupaten dan Bodetabekjur.
5. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan.
6. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan.
8. Mengembangkan registrasi kematian & registrasi migrasi masuk dan keluar untuk menyempurnakan data mutasi penduduk.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan, melalui :
 - a. Optimalisasi Pusat Informasi dan Konseling (PIK) keluarga serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
 - b. Memastikan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan.
 - c. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender.
 - d. Peningkatan kerjasama dengan lembaga dan institusi pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A, PKK, Dharma Wanita, BKOW dan lain-lain).

2. Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan jabatan publik.
3. Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak-hak anak menjadi peduli dan ramah anak.
5. Memperkuat kelembagaan perlindungan anak.
6. Meningkatkan kepedulian serta partisipasi keluarga, masyarakat, dan dunia usaha terhadap anti kekerasan.
7. Meningkatkan akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan forum partisipasi anak dalam pembangunan, serta penyediaan area bermain yang layak dan aman bagi anak-anak.
8. Peningkatan kerjasama antar lembaga dan institusi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Perlunya peningkatan jejaring dan peralatan dalam hal perlindungan perempuan dan anak.
10. Perlunya komitmen dari semua pihak dalam hal perlindungan perempuan dan anak.

I. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Arah kebijakan pembangunan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) di tahun 2012 yaitu :

1. Mempertahankan angka kelahiran Total (TFR).
2. Memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana serta jaminan ketersediaan kontrasepsi melalui penyelenggaraan KB gratis.
3. Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi individu dan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi, serta

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksi.

4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui :
 - a. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan, pembinaan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga.
 - b. Pemberdayaan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.

m. Sosial

Arah kebijakan pembangunan urusan sosial di tahun 2012 yaitu :

1. Penanggulangan PMKS, khususnya anak jalanan dan anak terlantar.
2. Rehabilitasi gedung-gedung panti sosial, Sasana Loka Bina Karya (LBK).
3. Peningkatan gizi makanan WBS serta penerapan Tahun Jamak dalam Penyediaan Makanan dan Minuman WBS di Panti-panti Sosial Dinas Sosial.
4. Penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi dengan pamong wilayah setempat, serta melibatkan kelompok masyarakat setempat seperti LSM, relawan tanggap bencana, dan relawan lokal, termasuk kelompok karang taruna.
5. Koordinasi antar Lembaga Sosial baik pemerintah atau swadaya masyarakat harus ditingkatkan agar lebih optimal dalam melakukan pelayanan dan penyaluran bantuan.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar anak jalanan dan pemberdayaan orangtua anak jalanan.
7. Asuransi keluarga miskin dan Jaminan Sosial Penyandang Cacat.
8. Antisipasi penanggulangan bencana siklus lima tahunan.

n. Ketenagakerjaan

Arah kebijakan pembangunan urusan ketenagakerjaan di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal, melalui:
 - a. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja utamanya yang merupakan lulusan SMK dan pencari kerja dalam sektor jasa agar memenuhi kebutuhan pasar kerja.
 - b. Memfasilitasi penyediaan diklat khusus sektor jasa tersier yang lulusannya bersertifikat kompetensi dan memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja spesifik tersebut.
 - c. Mengembangkan potensi pengiriman tenaga kerja dengan kemampuan khusus ke luar negeri.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja melalui internet.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
4. Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja.
5. Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil (lulusan BLK).
6. Memfasilitasi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
7. Meningkatkan kerja sama pemerintah dengan dunia usaha/industri.
8. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas BLK.
10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan.
11. Meningkatkan pengiriman transmigran yang memiliki keterampilan ke daerah tujuan transmigrasi.
12. Memperhatikan kesejahteraan para transmigran terutama di masa awal penempatan para transmigran.
13. Peningkatan sistem publikasi pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi.

o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Arah kebijakan pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan ketrampilan SDM Koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan manajemen organisasi, akses pemasaran dan pangsa pasar, akses permodalan, akses teknologi tepat guna serta kemitraan.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana promosi dan perdagangan produk koperasi dan UMKM agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global.
3. Penciptaan iklim yang mendukung pengembangan UMKM dan Koperasi di pasar regional dan global.
4. Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro/PKL agar tertata dengan baik sehingga mampu menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan wisatawan asing yang berkunjung ke kota Jakarta.
5. Peningkatan permodalan Koperasi dan UMKM melalui pembentukan Lembaga Penjamin Kredit, penumbuhan dan peningkatan peran KJK (Koperasi Jasa Keuangan) untuk permodalan usaha mikro.

p. Penanaman Modal

Arah kebijakan pembangunan urusan penanaman modal di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan iklim investasi melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum terkait investasi.
2. Menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bagian dari kelengkapan sarana untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ujungnya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Meningkatkan hubungan kemitraan bisnis melalui peningkatan promosi investasi di dalam dan di luar negeri secara terpadu dan bertindak lanjut.

4. Meningkatkan kualitas layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta fasilitas kerjasama strategis antara usaha besar dengan UMKM.
5. Melakukan optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Tingkat Provinsi dan Walikotamadya di DKI Jakarta melalui :
 - a. Dukungan dari dan koordinasi erat antar SKPD Teknis (dibantu dengan sistem *online*).
 - b. Peningkatan infrastruktur dan SDM pendukung PTSP.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Rutin untuk mengidentifikasi sebab-sebab keterlambatan atau penyimpangan lain terhadap SOP, dan aspek-aspek lain yang perlu ditingkatkan.

q. Kebudayaan

Arah kebijakan pembangunan urusan kebudayaan di tahun 2012 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bersejarah dan cagar budaya serta pengembangan permuseuman termasuk pengelolaan museum daerah sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pemahaman kekayaan budaya daerah.
2. Meningkatkan apresiasi seni masyarakat terhadap berbagai bentuk nilai dan keragaman melalui penyediaan fasilitas dan pembinaan seni budaya yang terkelola dengan baik, melalui kelembagaan pendidikan dan sanggar-sanggar yang ada di masyarakat, dengan agenda yang terjadwal secara reguler serta memfasilitasi berbagai aktivitas komunitas seni budaya.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya seni dan kebudayaan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia kebudayaan; peningkatan persahabatan antardaerah dan antarbangsa yang didukung oleh pengembangan diplomasi

kebudayaan, promosi kebudayaan, dan pertukaran kebudayaan; peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; dan pengembangan kemitraan antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

4. Mengembangkan kawasan budaya sebagai bentuk pengembangan nilai budaya dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

r. Pemuda dan Olahraga

Arah kebijakan pembangunan urusan pemuda dan olahraga di tahun 2012 yaitu:

1. Meningkatkan pembinaan dan partisipasi pemuda melalui:
 - a. Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan yang terbina secara berkelanjutan.
 - b. Peningkatan keikutsertaan pemuda pada kegiatan kepemudaan dan kepramukaan.
 - c. Peningkatan kepeloporan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga masyarakat melalui upaya pemassalan dan penggerakan minat masyarakat untuk berolahraga
3. Meningkatkan Prestasi olahraga melalui:
 - a. Peningkatan kualitas pembinaan atlet berprestasi melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) DKI Jakarta.
 - b. Peningkatan prestasi olahraga melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkelanjutan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
 - c. Peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, penyandang cacat dan masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.
 - d. Peningkatan keikutsertaan atlet DKI Jakarta pada event olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional.

- e. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi pelaku olahraga berprestasi
 - f. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam rangka peningkatan prestasi olahraga
 - g. Peningkatan kualitas pelatih olahraga.
4. Penyelenggaraan SEA Games XXVI/2011 dan persiapan PON XVIII/2012.
 5. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga, yang ditandai dengan :
 - a. Pembangunan stadion bertaraf internasional.
 - b. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana olahraga melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olahraga dan pemuda milik Pemda DKI Jakarta.
 - c. Peningkatan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana olahraga yang memenuhi standar, baik untuk olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi maupun industri olahraga.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Arah kebijakan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di tahun 2011 yaitu:

1. Meningkatkan upaya pengendalian potensi konflik di masyarakat, antara lain melalui:
 - a. Penerapan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
 - b. Regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan kelompok masyarakat dalam upaya mencegah timbulnya konflik antar anggota masyarakat.
2. Memfasilitasi parpol dalam rangka meningkatkan perannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan terciptanya kaderisasi pemimpin politik.

3. Meningkatkan upaya pemantapan demokrasi dan penegakan HAM melalui sosialisasi berbagai regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
4. Berfungsinya Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA).

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Arah kebijakan pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di tahun 2012 yaitu:

1. Kerjasama yang sinergis antara pusat-daerah, daerah-daerah khususnya di DKI Jakarta karena melekat karakteristik seperti yang diamanatkan pada UU No. 29 Tahun 2007, terutama dalam mempertegas konsep megapolitan dan penanggulangan bencana.
2. Dibuat skala prioritas dalam penyusunan anggaran dan kegiatan, terutama menyangkut hal vital dan hajat hidup orang banyak.
3. Kemauan Politik (*Political Will*) yang didukung dengan Peraturan Daerah dan Anggaran yang memadai.
4. Penduduk rentan administrasi kependudukan pada orang terlantar perlu masuk dalam kategori potensi bencana.
5. Pengembangan kapasitas individu dan masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi resiko ancaman/bahaya dan akibat bencana dengan didukung dengan kebijakan publik yang sesuai.
6. Membangun paradigma dan pola pikir masyarakat umum terkait tanggap dan penanggulangan bencana.
7. Manajemen pegawai di lingkungan Pemda lebih ringkas dan efisien.
8. Aparatur di tingkat birokrasi lini lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat (*service excellence*).
9. Rekrutmen CPNS melalui mekanisme *e-recruitment* yang berbasis web berbasis *job analysis*.

10. Pembentukan Perda Transparansi dan Komisi Transparansi perlu merujuk pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
11. Regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat lembaga kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
12. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.
13. Mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam satu pintu dengan menggunakan internet.
14. Menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
15. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan antara lain melalui regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat lembaga kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
16. Optimalisasi dan meningkatkan kapasitas antisipasi dalam penanggulangan bencana, utamanya regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, rescue dan pengelolaan bencana.
17. Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, antara lain melalui peningkatan kapasitas aparat dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban serta peningkatan peran masyarakat melalui kegiatan pemolisian masyarakat.
18. Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah untuk lebih berorientasi kepada masyarakat atau lapangan.
19. Meningkatkan sinergitas implementasi program kerja sama antar kota dan antar daerah melalui peningkatan kerja sama antar kota dan daerah baik dalam maupun luar negeri.
20. Melaksanakan penegakan hukum atas penyimpangan peraturan perundang-undangan.
21. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah.

22. Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi dengan menggunakan *assesment centre*
23. Meningkatkan program perizinan satu pintu/satu atap.
24. Mengintegrasikan sumber daya daerah dalam eskalasi bencana, dengan melibatkan secara penuh TNI dan POLRI.

u. Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pembangunan urusan ketahanan pangan di tahun 2012 yaitu:

1. Mengamankan jalur *supply*, gudang penyediaan *stock*, sistem dan mekanisme distribusi sembilan bahan pokok.
2. Penguatan Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, yang menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi seimbang dan berkelanjutan, baik di tingkat daerah, maupun rumah tangga.
3. Meningkatkan daya saing produk pertanian baik di pasar domestik maupun global melalui peningkatan mutu produk pertanian, efisiensi produksi, promosi, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang kondusif.
4. Meningkatkan gizi masyarakat di daerah rawan pangan dengan memberdayakan lumbung pangan di Kelurahan.
5. Mengembangkan pola diversifikasi pangan dengan meningkatkan kualitas produksi lokal.
6. Peningkatan peranan tim ketahanan pangan dan tim evaluasi harga.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Arah kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa(RW) di tahun 2012 yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan dan sosialisasi Program PPMK dan Program-program pemberdayaan masyarakat lainnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

2. Mengoptimalkan peran kader pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan sebagai *change agent* dalam berbagai program berbasis pemberdayaan.
3. Memanfaatkan secara optimal teknologi tepat guna hasil penemuan perguruan tinggi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
4. Jumlah Posyantek yang berfungsi sebanyak 44 unit.
5. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil TTG sebanyak 1.939 orang.
6. Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan aktif pada upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 1.173 orang.
7. Jumlah kader motivator TTG yang berperan aktif sebanyak 275 orang.
8. Mengoptimalkan pendampingan dan asistensi pengelolaan PPMK bina Fisik Lingkungan dan Sosial, bekerja sama dengan perguruan tinggi.

w. Statistik

Arah kebijakan pembangunan urusan statistik di tahun 2012 yaitu:

1. Menetapkan kebijakan pembiayaan sesuai perundangan untuk menunjang kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik.
2. Mengintegrasikan Urusan Statistik dengan Urusan Perencanaan Pembangunan.
3. Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan.
4. Menyusun berbagai produk statistik yang mendukung penyusunan kebijakan pembangunan kota.
5. Peningkatan ketersediaan statistik daerah yang diupdate setiap tahun.

x. Kearsipan

Arah kebijakan pembangunan urusan kearsipan di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan sesuai peraturan perundangan sehingga dapat melayani kebutuhan arsip baik yang berasal dari perangkat daerah maupun masyarakat.

2. Mengembangkan layanan arsip berbasis teknologi informasi (*virtual bank*) untuk menjamin kemudahan akses informasi kearsipan.
3. Meningkatkan sarana prasarana kearsipan khususnya digitalisasi arsip yang menunjang kapasitas dan kualitas penyimpanan arsip sesuai standar.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kearsipan yang kompeten dalam melaksanakan tugas.
5. Menyediakan security sistem ruang penyimpanan arsip sebanyak 1 (satu) unit.
6. Meningkatkan jumlah SKPD/ UKPD yang terlayani dalam kearsipan.
7. Meningkatkan jumlah masyarakat yang terlayani dalam kearsipan.

y. Komunikasi dan Informatika

Arah kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika di tahun 2012 yaitu:

1. Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (*e-government*) yang dimulai dengan, proses perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) dan proses pengadaan barang (*e-procurement*) serta pengawasan.
2. Meningkatkan citra positif Pemerintah.
3. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet.
4. Melaksanakan pelayanan perijinan berbasis internet.
5. Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat kelurahan (*Wide Area Network*)
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi.
7. Meningkatkan prosentase implemetasi website pelayanan terpadu satu pintu.

z. Perpustakaan

Arah kebijakan pembangunan urusan perpustakaan di tahun 2012 yaitu :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan dengan berfungsinya 2 perpustakaan berstandar Internasional (Jakarta Utara dan Jakarta Barat) serta mengembangkan 43 perpustakaan di 6 wilayah kota/kabupaten.
2. Meningkatkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi informasi dengan mengembangkan Sistem Informasi Perpustakaan Jakarta.
3. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Taman Bacaan Masyarakat (TBM), perpustakaan di sekolah, perpustakaan Kumis (Kumuh dan Miskin) dan Hanjaba, serta meningkatkan pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui pengadaan perpustakaan keliling.
5. Meningkatkan kompetensi pengelola Taman Bacaan.
6. Meningkatkan jumlah layanan dan informasi perpustakaan yang berbasis teknologi informasi.
7. Meningkatkan jumlah perpustakaan umum swasta yang terbina pemprov DKI Jakarta.
8. Meningkatkan pembinaan terhadap Perpustakaan Khusus.
9. Guna memberikan kenyamanan bagi pengguna perpustakaan, maka perlu dilakukan rehabilitasi perpustakaan baik di tingkat propinsi maupun wilayah (bangunan, interior, system informasi dan *system security* perpustakaan).

aa. Energi dan Sumber Daya Mineral

Arah kebijakan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral di tahun 2012 yaitu :

1. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana, prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU).
2. Meningkatkan penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia, untuk antisipasi masalah kebencanaan dan lingkungan.

3. Mendorong peningkatan distribusi layanan BBG di Jakarta.
4. Meningkatkan kuantitas resapan air.
5. Peningkatan pembangunan sumur resapan dalam rangka konservasi air tanah.
6. Peningkatan penelitian bahan galian, listrik, energi dan migas.
7. Terpenuhinya kebutuhan listrik di Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan 24 jam penuh dan dikelola dengan baik.

bb. Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan urusan pariwisata di tahun 2012 yaitu:

1. Mewujudkan Jakarta sebagai pusat destinasi wisata dengan upaya pengembangan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik; serta meningkatkan standar kualitas pelayanan infrastruktur penunjang wisata, sehingga Jakarta mampu memenuhi kenyamanan, keamanan dan kepuasan wisatawan.
2. Mewujudkan citra Jakarta sebagai salah satu destinasi utama wisata *Meeting, Incentives, Convention, Exhibition (MICE)*.
3. Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi, dan kebudayaan.
4. Meningkatkan cakupan event promosi Jakarta baik dalam maupun luar negeri.
5. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat pariwisata melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jasa layanan pariwisata.
6. Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional dalam memacu percepatan pertumbuhan pariwisata Ibukota Jakarta.
7. Meningkatkan standar kualitas pelayanan fasilitas dan objek wisata kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung.

8. Optimalisasi pemanfaatan ikon pariwisata dan budaya di DKI Jakarta, serta program-program pendukung seperti promosi dan sosialisasi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Program-program yang sudah ada dinilai kurang efektif, belum tepat sasaran, dan belum terlihat integrasinya di masyarakat.
9. Meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

cc. Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Arah kebijakan pembangunan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan di tahun 2012 yaitu:

1. Menetapkan kerangka regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil perikanan dan kelautan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pesisir dan pulau kecil.
4. Melakukan penataan dan pengembangan pelabuhan perikanan beserta kelengkapan sarana dan prasarana lainnya yang memudahkan nelayan.
5. Tersedianya tempat pelatihan yang modern bagi nelayan.
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu serta kesehatan masyarakat *veteriner*.
7. Melakukan sosialisasi dan relokasi lahan peternakan dan pemotongan unggas ke luar wilayah DKI Jakarta secara bertahap berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007.
8. Pembebasan lahan tanah untuk hutan kota sawah abadi.
9. Pembangunan TPA/TPnA di 5 lokasi.
10. Pengembangan produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor.
11. Optimalisasi diversifikasi pemanfaatan sumber daya laut.
12. Pembangunan pelabuhan nelayan dan pasar ikan yang modern.

dd. Perdagangan

Arah kebijakan pembangunan urusan perdagangan di tahun 2012 yaitu:

1. Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat.
2. Meningkatkan regulasi perdagangan dan membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar ekspor produk yang memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan promosi.
3. Melakukan fasilitasi komunitas profesional dalam praktisi dalam upaya promosi terpadu industri, perdagangan dan wisata.
4. Menyempurnakan sistem jaringan distribusi produk perdagangan dan menyelenggarakan secara teratur pasar lelang *forward* untuk komoditas tertentu.
5. Mewujudkan pusat distribusi produk agro skala regional.
6. Melakukan fasilitasi terhadap industri kecil ramah lingkungan dalam lingkungan perumahan.
7. Menerapkan regulasi manajemen mutu berstandar internasional dan pengujian mutu produk yang diperdagangkan.

3. Pembangunan DKI Jakarta Menurut Prioritas Wilayah

Prioritas pembangunan wilayah ditetapkan menurut lima Indikator Kinerja Utama Kota dan Kabupaten Administrasi, yaitu :

- 1) Bangun Praja / Adipura
- 2) RW Binaan Kumuh
- 3) Gerakan Jumat Sehat
- 4) Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap
- 5) Penataan Kawasan Khusus / Unggulan

Gambar II.3
Pembangunan DKI Jakarta Menurut
Prioritas Wilayah



Sumber : RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012